



BSKDN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA
EMAS
2045

PEMBAHARUAN PENGUKURAN IPKD TAHUN ANGGARAN 2025, TAHUN UKUR 2026

DIMENSI 1

SEMULA

Terdapat 5
Indikator Penilaian

1

Kesesuaian Nomenklatur
Program RPJMD dan RKPD

2

Kesesuaian Nomenklatur Program
RKPD dan KUAPPAS

3

Kesesuaian Nomenklatur Program
KUAPPAS dan APBD

4

Kesesuaian Pagu Program
RKPD dan KUAPPAS

5

Kesesuaian Pagu Program
KUAPPAS dan APBD

Kesesuaian Nomenklatur
Program RPJMD dan RKPD

1

Kesesuaian Nomenklatur
Program RKPD dan KUAPPAS

2

Kesesuaian Nomenklatur
Program KUAPPAS dan
APBD

3

Kesesuaian Pagu Program
RKPD dan KUAPPAS

4

Kesesuaian Pagu Program
KUAPPAS dan APBD

5

Kesesuaian Target Kinerja Kerangka
Ekonomi Makro (KEM) Provinsi, Kabupaten
Dan Kota Terhadap Kem Nasional

6

Kesesuaian TindakLanjut DukunganPemda
Atas Kebijakan Prioritas Nasional

7

MENJADI

Bertambah Menjadi
7 Indikator



BSKDN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA
EMAS
2045

PEMBAHARUAN PENGUKURAN IPKD TAHUN ANGGARAN 2025, TAHUN UKUR 2026

DIMENSI 2

SEMULA

Terdapat 4
Indikator Penilaian

1

Alokasi Anggaran Belanja Untuk Fungsi Pendidikan Sebesar 20%

2

Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Maksimal sebesar 30% dari Total Belanja APBD

3

Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur sebesar 40% dari Total Belanja APBD

4

Alokasi Anggaran Belanja Untuk Memenuhi SPM

Alokasi Anggaran Belanja Untuk Fungsi Pendidikan Sebesar 20%

1

Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Maksimal sebesar 30% dari Total Belanja APBD

2

Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur sebesar 40% dari Total Belanja APBD

3

Alokasi Anggaran Belanja Untuk Memenuhi SPM

4

Alokasi Belanja Wajib yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Persentase dan Penggunaannya Telah Ditentukan

5

MENJADI

Bertambah Menjadi
5 Indikator



BSKDN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA
EMAS
2045

PEMBAHARUAN PENGUKURAN IPKD TAHUN ANGGARAN 2025, TAHUN UKUR 2026

DIMENSI 3

**Terdapat 16 Dokumen yang
Harus Dipublikasikan**

SEMULA

1

Ketepatan waktu (maksimal 30 hari setelah ditetapkan)

2

Keteraksesan (Diunggah pada laman web utama pemda dan dapat diakses, dokumen utuh dan lengkap, serta dapat diunduh secara publik)

**Bertambah Menjadi 19 Dokumen
yang Harus Dipublikasikan**

Ketepatan waktu (maksimal 30 hari setelah ditetapkan)

1

Keteraksesan (Diunggah pada laman web utama pemda dan dapat diakses, dokumen utuh dan lengkap, serta dapat diunduh secara publik)

2

MENJADI

Terdapat 19 Dokumen
yang Harus
Dipublikasikan



BSKDN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA
EMAS
2045

PEMBAHARUAN PENGUKURAN IPKD TAHUN ANGGARAN 2025, TAHUN UKUR 2026

DIMENSI 4

SEMULA

Terdapat 3
Indikator Penilaian

1

Penyerapan Anggaran Belanja Operasional

2

Penyerapan Anggaran Belanja Modal

3

Penyerapan Anggaran Belanja Transfer

Indikator Penyerapan Anggaran Belanja

- a. Belanja Operasional
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Transfer

1

MENJADI

Berubah Menjadi 2
Indikator Penilaian

2

Indikator Capaian Kinerja
Anggaran Belanja Daerah,
yang mencakup capaian
kinerja per masing-masing
bidang urusan pemerintahan